

**RANCANGAN AKHIR RENJA
TAHUN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALINAU**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir PD) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tahun 2024 telah selesai kami susun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2024 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2024 bagi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Malinau sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021– 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021– 2026 yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun. Sehingga dapat berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan telah tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2024 ini diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban Visi dan Misi untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2024 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malinau dan Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Malinau, Juli 2023
Kepala Badan

MULIYADI, SH., M.Si
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19740525 200112 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN 5
1.1	Latar Belakang 5
1.2	Landasan Hukum Penyusunan 6
1.3	Maksud Dan Tujuan..... 7
1.4	Sistematika Penulisan 8
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD 9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD 17
2.3	Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan fungsi OPD 19
2.4	Review Terhadap RKPD/Renstra OPD 20
2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 32
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45
BAB V	PENUTUP 56

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN BAGAN

		Halaman
Gambar 2.1	Proposal Bantuan hibah dari Partai Politik Tahun 2022	11
Gambar 2.1	Kegiatan Sosialisasi UU Pemilu Tahun 2022	11
Tabel 29	Capaian Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022	13
Tabel 30	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel 31	Review Terhadap Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2024.....	23
Tabel 32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan, Pokir DPRD Tahun 2024	32
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Renja Tahun 2024	35
Bagan 3.2	Bagan Pohon Masalah	36
Bagan 3.3	Bagan Tujuan/Kinerja	37
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju.....	40
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	45
Tabel 4.2	Rencana Kerja Dan Pendanaan	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2024 ini adalah merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan, dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2024 dan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah. Rankhir Renja PD Tahun 2024 memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaanya yang hendak dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dalam mengemban visi dan misi yang mengacu pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026;
2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2016;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Onventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rankhir Renja PD Tahun 2024 harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026. Dengan disusunnya Rankhir Renja PD Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Dalam prosesnya, penyusunan Rankhir Rencana Kerja PD Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rankhir Rencana Kerja PD Tahun 2024 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan Akhir RKPD 2024, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja Rankhir Renja Tahun 2024 terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD

menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Rancangan Akhir Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Awal Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Bupati Malinau tentang Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 Nomor 28.1 Tahun 2021 tertanggal 14 November 2021;
 13. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tertanggal 12 Juli 2023 tentang RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan prosedur serta pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan dan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

B. Tujuan

1. Agar kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi, teratur untuk menjadi landasan pengendalian dalam program kegiatan.
2. Agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi program kegiatan dalam mewujudkan visi, misi yang telah dirumuskan sesuai Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau 2021 - 2026.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan.
4. Agar tercapai sumber daya secara efektif dan efisien yang berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyusunan Rencana Akhir Renja Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap RKPD/Renstra OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Penelaahan Kebutuhan Mendesak OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Tahun 2021 - 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait hal tersebut Ranwal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2024 menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 - 2026 dan perkiraan target tahun 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.5.491.145.362,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) yang dijabarkan melalui 3 Program 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau. Pada program ini terdapat 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Meliputi kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN di Bakesbangpol Kabupaten Malinau. Pada tahun 2022, kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dengan anggaran sebesar Rp. 4.287.363.212 dan terealisasi sebesar Rp. 3.770.990.259 atau 87,96%.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meliputi kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Bakesbangpol Kabupaten Malinau. Pada tahun 2022, kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dengan anggaran sebesar Rp. 14.044.600 dan terealisasi sebesar Rp. 10.501.900 atau 74,78%.

- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meliputi kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bakesbangpol Kabupaten Malinau. Pada tahun 2022, kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dengan anggaran sebesar Rp. 18.158.550 dan terealisasi sebesar Rp. 18.158.550 atau 100%.
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Meliputi kegiatan fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD pada Bakesbangpol Kabupaten Malinau. Pada tahun 2022, kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dengan anggaran sebesar Rp. 144.579.000,- dan terealisasi sebesar Rp.143.935.920,- atau 99,56%.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Meliputi kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas secara operasional dan administratif pada Bakesbangpol Kabupaten Malinau. Pada tahun 2022, kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.000.000,- atau 100%.

B. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
Pada tahun 2022, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 300.000.000,- atau sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan bantuan dana hibah kepada 8 Partai Politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD. Kegiatan bantuan dana hibah bagi Parpol ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada Partai Politik dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan Pendidikan Politik bagi masyarakat dan kader partai semakin meningkat.

- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.

Pada tahun 2022, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.993.500,- atau sebesar 99,99%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan Sosialisasi pendidikan bagi pemilih pemula dan penyusunan naskah akademis dana cadangan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan. Pada Tahun 2022 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Malinau Kota dengan narasumber dari Bawaslu Kab. Malinau dan KPU Kab. Malinau.

Gambar 2.1 Proposal Bantuan Hibah dari Partai Politik



Gambar 2.2 Kegiatan Sosialisasi UU Pemilu Kepada Masyarakat



C. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
2. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

Pada tahun 2022, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 600.000.000,- atau sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan bantuan dana hibah kepada 2 instansi vertikal TNI dan Polri dan 1 Ormas yaitu FKUB. Kegiatan bantuan dana hibah ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam pembangunan, mendukung dan terselenggaranya kemasyarakatan dengan fungsi pemerintahan, memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau menyajikan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 29
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (tahun 2023)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja capaian Program (renstra PD Th 2024)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2022)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Th Berjln (Tw 1 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.	Urusan Pemerintahan Umum									
8.01	Bidang kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap anggaran total	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	100	32 Orang	32 Orang	25
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

8.01.01.2.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	30	30
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	30	30
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Kali	25 Kali	20 Kali	20 Kali	100	20 Kali	5 Kali	30
8.01.03	Program Peningkatan Peran partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik untuk Parpol yang ada di Kabupaten Malinau	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Parpol yang mendapatkan Pendidikan Politik	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan	8 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	100	8 Parpol	8 Parpol	75

	Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	50 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	50 Orang	25

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja capaian Program (renstra PD Th 2024)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2022)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan	Terlaksananya	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi

8.01.06.2.01	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	kerjasama OPD dengan instansi vertikal dalam kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial								
8.01.06.2.01.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kali pemberian hibah kepada FKUB, TNI dan Polri	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	100	1 Kali/Tahun	-	-

2.2. Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Badan Kesbangpol merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat, selama kurun waktu pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD digambarkan dalam Tabel 30 sebagai berikut :

Tabel 30
Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
A.	Indikator Kinerja Kunci											
1.	Persentase Parpol yang mendapatkan pendidikan politik		100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Terlaksananya kerjasama OPD dengan instansi vertikal dalam kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	2 Instansi	
3.	Pembentukan Forum Pembauran tingkat Kabupaten	Sdh terbentuk	1 Forum	0	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	
4.	Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Sdh terbentuk	1 Forum	0	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	

2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejak era reformasi, kehidupan demokrasi, kehidupan politik nasional mengalami kemajuan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal seperti ini satu sisi menjadi hal yang merupakan kemajuan, namun disatu sisi juga merupakan menjadi hal yang perlu disikapi, karena hal tersebut telah merubah pola kehidupan masyarakat. Masyarakat sering bertindak individualistis dan berkelompok. Masyarakat, telah mengadopsi budaya baru yang belum sepenuhnya dipahami serta diyakini kebenaran dan kesesuaian dengan karakter bangsa. Nilai – nilai luhur bangsa dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan di era sekarang.

Dampak demokratisasi yang tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang jauh berbeda dengan nilai-nilai Pancasila. Hal seperti ini terlihat pada kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi dalam menyelesaikan masalah bangsa. Pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai – nilai luhur Pancasila dewasa ini juga dinilai telah memudar. Utamanya di kalangan generasi muda. Wawasan kebangsaan menjadi hal yang abstrak dan jauh dari pemahaman di kalangan generasi muda.

Demokrasi yang berlebihan dan memudarnya pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, menjadi masalah yang krusial bagi pemerintah saat ini, disamping majunya pembangunan nasional yang bisa menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Pro kontra yang terjadi akibat pembangunan infra struktur di masyarakat juga harus disikapi oleh pemerintah.

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis.

Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Keamanan daerah dapat tercipta apabila kondisi masyarakat stabil didukung dengan pemahaman akan hak dan kewajiban masing – masing, serta loyalitas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diwujudkan dengan tingginya rasa nasionalisme masyarakat.

Sesuai dengan uraian diatas maka dirumuskan isu isu yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja SKPD antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Banyaknya Ormas/LSM yang belum melaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas/LSM
4. Potensi terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjelang Pemilu serentak tahun 2024
5. Munculnya isu radikalisme, aliran sesat yang bisa memicu stabilitas keamanan di daerah
6. Melemahnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda
7. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda
8. Berkembangnya hoax (berita bohong)
9. Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing
10. Peningkatan partisipasi politik masyarakat

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan :

1. Rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat khususnya anak remaja.
2. Potensi kerawanan sosial di masyarakat baik yang kontra maupun yang pro terhadap kebijakan pemerintah Daerah.
3. Potensi penyebaran paham-paham radikalisme dan aliran sesat yang memicu stabilitas keamanan di daerah.

Peluang Pengembangan :

1. Ketersediaan media informasi
2. Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi politik

Guna menjawab tantangan dan permasalahan seperti tersebut diatas, perlu diciptakan masyarakat yang aman, tenteram serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Diperlukannya peningkatan wawasan kebangsaan pada masyarakat, sehingga akan mendukung stabilitas keamanan daerah yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau disusun sebagai landasan dasar dalam menentukan kebijakan strategis dengan harapan mampu memecahkan sebagian persoalan yang dihadapi khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional maupun global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau. Ruang lingkup perencanaan pembangunan ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Bupati Malinau. Pengukuran pencapaian rencana dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara kontinyu dilakukan agar diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

1. Telaah isu strategis, prioritas dan sasaran

Tahun 2024 merupakan tahun politik, berdasarkan dinamika dalam masyarakat yang berkembang, diperlukan sikap yang tidak egosentris dalam menyikapi fenomena tersebut. Potensi konflik bisa muncul kapan saja, maka untuk mensiasati kemungkinan-kemungkinan tersebut perlu adanya sikap saling menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama. Kedewasaan dalam pola pikir, berpolitik dan mengambil sikap sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga kebhinekaan NKRI dengan memprioritaskan keamanan serta ketertiban demi terjaganya kesatuan dan persatuan bangsa.

2. Kebijakan Pusat

Berdasarkan Perpres 51 tahun 2022 dan Permendagri 84 tahun 2022, Paskibraka yang sebelumnya berada di bawah naungan Dispora, maka sepenuhnya menjadi wewenang Badan Kesbangpol dan hal ini mulai diberlakukan tahun 2023, sedangkan untuk Kabupaten Malinau baru akan diterapkan di tahun 2024. Dengan adanya kebijakan tersebut tentunya berpengaruh ke rencana kinerja selanjutnya dikarenakan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra 2021-2026 tidak terakomodir kegiatan tersebut, Perpres tersebut muncul di tahun ke-2 setelah adanya pembagian pagu indikatif untuk 5 tahun kedepan. Hal yang sama juga terkait dana Pemilu yang dihibahkan dari Badan Kesbangpol ke KPU dan Bawaslu.

3. Analisa Kebutuhan Anggaran

Berdasarkan pagu indikatif yang ada dalam RPJMD dan Renstra 2021-2026 belum sepenuhnya mengakomodir semua kegiatan yang ada. Hal ini disebabkan seiring berjalannya waktu adanya perubahan regulasi dari Pusat yang harus diikuti oleh daerah sehingga mengakibatkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang memerlukan proses.

Review terhadap Rancangan Awal Renja/ Renstra OPD Kabupaten Malinau, disajikan dalam tabel 31 berikut :

Tabel 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KM	Persentase anggaran program penunjang terhadap anggaran total	100 %	4.883.145.433	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KM	Persentase anggaran program penunjang terhadap anggaran total	100 %	5.143.145.433	
A..	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1..	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Lapor an	166.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bl	170.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Ke giatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KM	Jumlah ASN	32 Orang	4.283.145.433	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KM	Jumlah ASN	32 Ora ng	4.283.145.4 33	
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KM	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	65.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor	KM	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Pak et	75.000.000	
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	KM	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	55.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	KM	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Pak et	65.000.000	
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KM	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	58.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KM	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Pak et	70.000.000	
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	KM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	15 Laporan	229.000.000	Penyelengg araan rapat	KM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	15 Lap	450.000.000	

	konsultasi SKPD		koordinasi dan konsultasi SKPD			koordinasi dan konsultasi SKPD		koordinasi dan konsultasi SKPD	oran		
No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KM	Persentase masyarakat yang memahami ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	45.000.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KM	Persentase masyarakat yang memahami ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	1.250.000.000	
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	KM	Jumlah fasilitasi kegiatan FPK, GNRM, Paskibraka dan Sosialisasi Bela Negara di Kab. Malinau	4 Fslts	45.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka	KM	Jumlah fasilitasi kegiatan FPK, GNRM, Paskibraka dan Sosialisasi Bela Negara di Kab. Malinau	4 Fslts	1.250.000.000	Pagu Paskibraka menyesuaikan dengan pagu yang ada di OPD sebelumnya

						Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
III.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	KM	Persentase kualitas keadaan aman, nyaman dan damai di lingkungan masyarakat	100	135.000.000	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	KM	Persentase kualitas keadaan aman, nyaman dan damai di lingkungan masyarakat	100	550.000.000	
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.										

1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KM	Jumlah paket bantuan hibah kepada Parpol dan jumlah sosialisasi UU bantuan keuangan Parpol	2 Kegiatan	35.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KM	Jumlah paket bantuan hibah kepada Parpol dan jumlah sosialisasi UU bantuan keuangan Parpol	2 Kegiatan	550.000.000	Jumlah hibah enunggu penetapan APBD
2.	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KM	Jumlah laporan monitoring pemilihan kepala daerah 2024, pengamanan pemilihan kepala daerah 2024 serta tim desk pemilihan kepala daerah 2024	3 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi	KM	Jumlah laporan monitoring pemilihan kepala daerah 2024, pengamanan pemilihan kepala daerah 2024 serta tim desk pemilihan kepala daerah 2024	3 Laporan		

						Politik di Daerah					
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
IV.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	KM	Persentase tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	100	110.000.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	K M	Persentase tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	100	1.550.000.000	
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										

1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KM	Jumlah paket bantuan hibah kepada TNI dan Polri	1 Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KM	Jumlah paket bantuan hibah kepada TNI dan Polri	1 Paket	300.000.000	Jumlah hibah enunggu penetapan APBD
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KM	Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1 Fslts	10.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KM	Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1 Fslts	250.000.000	
3.	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	KM	Jumlah kegiatan fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah, fasilitasi Tim Pemantauan Orang Asing, dan fasilitasi	3 Fslts	70.000.000	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	KM	Jumlah kegiatan fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah, fasilitasi Tim Pemantauan	3 Fslts	750.000.000	

	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tim Terpadu Penanganan Konflik			Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Orang Asing, dan fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik			
4.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	KM	Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Fslts	30.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	KM	Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Fslts	250.000.000	
V.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	KM	Persentase pembinaan forum kerukunan umat beragama	100	110.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	KM	Persentase pembinaan forum kerukunan umat beragama	100	1.050.000.000	
A.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya										
1.	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di	KM	- Jumlah paket bantuan hibah kepada FKUB - Jumlah peserta sosialisasi NAPZA	1 Paket 250 Orang	- 75.000.000	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat	KM	- Jumlah paket bantuan hibah kepada FKUB - Jumlah peserta sosialisasi NAPZA	1 Paket 250 Orang	200.000.000 350.000.000	

	derah					beragama dan penghayat kepercayaan di daerah					
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	KM	Jumlah laporan survey IKUB di Kab. Malinau	1 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	KM	Jumlah laporan survey IKUB di Kab. Malinau	1 Laporan	500.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat,, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, DPRD maupun hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten.

Tabel 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan
Pokir DPRD Tahun 2023

N o.	Usulan Kegiatan	Lokasi	Besaran/Vol ume	Rekomendasi	Catatan/Alasan
1.	Pembentukan rumah moderasi beragama bagi FKUB	Kab. Malinau	1 Unit	Reses dan Kunker	Diarahkan ke DPU, PR dan Perkim
2.	Sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Desa Malinau Kota Rt 5, 14, 15	3 Unit	Reses dan aspirasi masyarakat	Diarahkan ke Satpol PP & Damkar

Dari hasil Verifikasi Pokir oleh Badan Kesbangpol dan Bappeda maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Usulan Pembentukan rumah moderasi beragama bagi FKUB 1 unit hasil reses dan kunjungan kerja anggota DPRD diarahkan ke DPU,PR dan Perkim dengan pertimbangan bahwa Badan Kesbangpol sesuai tugas dan fungsi tidak melaksanakan pembangunan fisik.
2. Usulan Sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi warga desa malinau kota (rt 5, 14 dan 15) serta 3 unit alat untuk pencegahan kebakaran berdasarkan hasil reses dan kunjungan kerja anggota DPRD diarahkan ke Satpol PP & Damkar dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut yang berwenang dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Merupakan bentuk dan arah masa depan organisasi sehingga dapat mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan untuk memberikan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan dan sebagai gambaran masa depan yang diinginkan dalam periode perencanaan serta untuk mendukung dan mengawal visi dan misi Bupati Malinau terpilih periode 2021-2024.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Sesuai dengan RKP Pemerintah Pusat Tahun 2024 pada Prioritas Nasional ke 7 yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik, maka stabilitas Polhukam yang dimaksud antara lain penguatan kebebasan sipil dan hak politik, penciptaan kondisi aman, dan peningkatan akses dan kualitas informasi publik. Hal itu penting karena beberapa isu yang berkembang di bidang Polhukam banyak menegaskan dinamisnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan selama 5 (Lima) tahun kurun waktu 2016 – 2021 telah menghasilkan kemajuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan telah meletakkan landasan yang kuat bagi Kabupaten Malinau untuk melanjutkan pembangunan pada tahun yang akan datang. Pencapaian target pembangunan selama RPJMD 2021 – 2026.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran dan guna mewujudkan hal tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian prioritas optimalisasi tata kelola pelayanan publik dengan pelaksanaan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan sumber daya kondisi aktual dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (Satu) tahun anggaran maka arah pembangunan selama 1 tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah yang mendesak sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2024.

Melalui eksplorasi terhadap Lingkungan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dapat diidentifikasi lingkungan internal sebagai berikut

Lingkungan Internal :

a. Dukungan SDM / Pegawai

Sumber Daya Manusia di Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau sampai pada saat ini berjumlah 32 orang. Dengan Keadaan pegawai yang terbatas Badan Kesbangpol masih membutuhkan personil karena masih ada formasi yang belum diisi. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol secara optimal maka diperlukan penambahan SDM baik kualitas maupun kuantitas

b. Peralatan / Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memenuhi kebutuhan. Jumlah kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda dua maupun kendaraan dinas roda empat belum memenuhi kebutuhan, jika dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang ada.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan mengarah pada kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan pelaksanaan yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau menetapkan tujuan dan sasaran dimaksud sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam bingkai NKRI

Sasaran :

- a. Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas
- b. Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan politik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

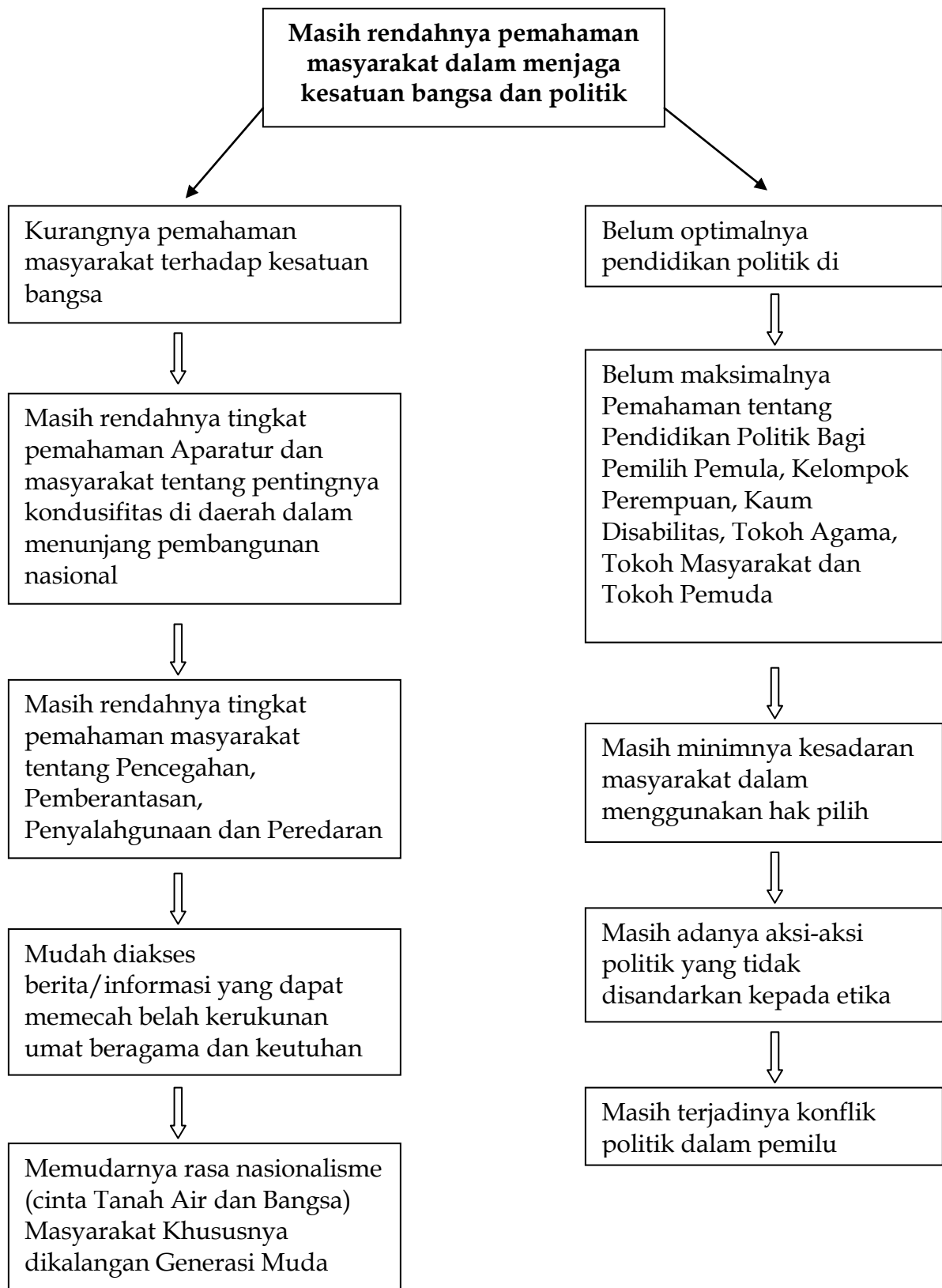
Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target tersaji pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

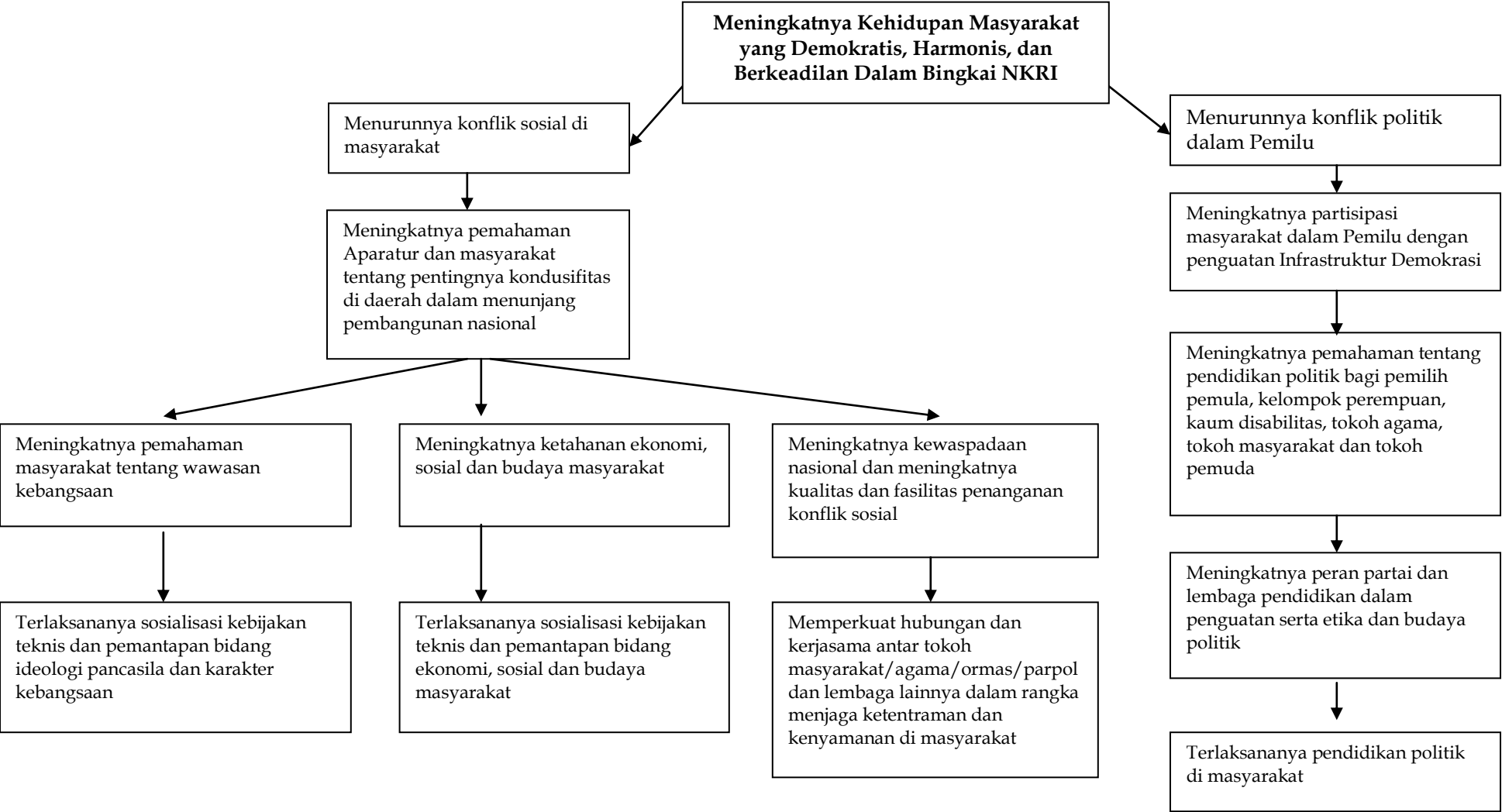
Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis Dalam Bingkai NKRI	Persentase stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya)			100 %
			Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	0 %
			Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	81%
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	72

Bagan 3.2 Pohon Masalah



Bagan 3.3 POHON TUJUAN/KINERJA



3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau periode 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

'Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional'

Visi Kabupaten Malinau merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai visi Kabupaten Malinau maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal.
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 (satu) RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu, Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.

Misi ke-1 (satu) tersebut pada tujuan ke-2 yaitu Menciptakan Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran yang terkait dengan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat dengan indikator Indeks Kerukunan Beragama.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi umum Perangkat Daerah
4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Bangsa

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

2. pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disesuaikan sebagai berikut :

TABEL 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU

N O	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMB ER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.882.385.433,00				9.543.145.433,00
I	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.982.385.433,00	APBD			5.143.145.433,00
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				166.000.000,00				170.000.000,00
1	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Laporan	166.000.000,00			1 Laporan	170.000.000,00
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.382.385.433,00				4.283.145.433,00
2	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	32 Orang	4.382.385.433,00			32 Orang	4.283.145.433,00
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				407.000.000,00				660.000.000,00
3	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Paket	65.000.000,00			1 Paket	75.000.000,00
4	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Paket	55.000.000,00			1 Paket	65.000.000,00
5	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Paket	58.000.000,00			1 Paket	70.000.000,00

6	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	15 Laporan	229.000.000,00			15 Laporan	450.000.000,00
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.000.000,00				30.000.000,00
7	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Unit	27.000.000,00			1 Unit	30.000.000,00
II	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				45.000.000,00	APBD			1.250.000.000,00
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				45.000.000,00				1.250.000.000,00
8	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	50 Orang	45.000.000			50 Orang	300.000.000,00
III	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.635.000.000,00	APBD			550.000.000,00
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.535.000.000,00				550.000.000,00

9	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	100 Orang	1.535.000.000			1 Paket	300.000.000,00
10	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Laporan	100.000.000			-	-
IV	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				110.000.000,00	APBD			1.050.000.000,00
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				110.000.000,00				1.050.000.000,00
11	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	50 Orang	75.000.000			50 Orang	200.000.000,00

			Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
1 2	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Laporan	35.000.000,00			1 Laporan	500.000.000,00
V	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				110.000.000,00	APBD			1.550.000.000,00
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				110.000.000,00				1.550.000.000,00
1 3	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	10 Orang	10.000.000,00			10 Orang	250.000.000,00
1 4	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Laporan	70.000.000,00			1 Laporan	250.000.000,00

		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
1 5	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Malinau	(Kab. Malinau, KAB. MALINAU)	1 Kegiatan	30.000.000,00			1 Kegiatan	250.000.000,00
	JUMLAH					6.882.385.433,00				9.543.145.433,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke -1), yakni mewujudkan sumber daya yang unggul. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mencakup 5 program dengan 21 sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kesbangpol Tahun 2024

No.	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		D.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	E.	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
III.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	F.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
IV.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	G.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

V.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	H.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
----	---	----	--	---

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tahun 2024 serta pendanaan, tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2024

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.283.145.433
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5.283.145.433
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.883.145.433
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								166.000.000
1.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Penyusunan SAKIP OPD, Rencana Kerja SKPD, Monev RKPD, laporan pengendalian dan evaluasi kinerja	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kab. Malinau	100 %	1 Laporan	100 %	166.000.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.283.145.433
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kab. Malinau	100 %	32 orang	100 %	4.283.145.433

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								407.000.000
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kab. Malinau	100 %	1 Paket	100 %	65.000.000
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Tersedianya bahan logistic kantor	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kab. Malinau	100 %	1 Paket	100 %	55.000.000
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kab. Malinau	100 %	1 Paket	100 %	58.000.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kab. Malinau	100 %	15 Laporan	100 %	229.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
									27.000.000
D.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Terpeliharanya kendaraan dinas pejabat eselon II berupa roda 4 berjumlah 1 unit	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kab. Malinau	100 %	1 unit	100 %	27.000.000
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								45.000.000
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								45.000.000
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Capaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terselenggaranya FPK Terselenggaranya GNRM Terselenggaranya sosialisasi Bela Negara Terselenggaranya upacara hari besar nasional	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kab. Malinau	100 %	1 Kali 1 Kali 1 Kali	100 %	45.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								135.000.000
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.								135.000.000

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Capaian penguatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika setta budaya politik	Penyaluran hibah bantuan keuangan Parpol Terselenggaranya sosialisasi UU tentang pemberian hibah kepada Parpol	Dukungan 100 % terhadap Capaian penguatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika setta budaya politik	Kab. Malinau	100 %	1 Kali 2 Kali	100 %	(Hibah persetujuan/A PBD 2024) 35.000.000
2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Capaian Pelaksanaan Monitoring dan Pengamanan Pemilu 2024	Monitoring Pemilukada Th 2024 Pengamanan Pilbup dan Wabup 2024 Monitoring Tim Desk Pemilukada 2024	Dukungan 100 % terhadap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta	Kab. Malinau	100 %	100 %	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100.000.000

				Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								110.000.000
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Penyaluran hibah bantuan keuangan kepada TNI dan Polri	Dukungan 100 % terhadap kerjasama dengan instansi vertikal	Kab. Malinau	100 %	1 Kali	100 %	(Hibah persetujuan/A PBD 2024)
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan	Terfasilitasinya FKDM	Dukungan 100 % terhadap capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi	Kab. Malinau	100 %	1 Kali	100 %	10.000.000

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	konflik sosial		penanganan konflik sosial					
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Terfasilitasinya Tim Kewaspadaan Dini Terlaksananya Pengawasan Orang Asing Terfasilitasinya Tim Terpadu Penanganan Konflik	Dukungan 100 % terhadap capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kab. Malinau	100 %	1 Kali 1 Kali 1 Kali	100 %	70.000.000
4.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Terasilitasinya Forkopimda	Dukungan 100 % terhadap capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kab. Malinau	100 %	1 Kali	100 %	30.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								110.000.000
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Capaian peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Penyaluran hibah bantuan keuangan kepada FKUB Terlaksananya sosialisasi NAPZA	Dukungan 100 % terhadap lembaga lain serta memperkuat mental generasi muda terhadap NAPZA	Kab. Malinau	100 %	1 Kali	100 %	(Hibah persetujuan/A PBD 2024) 75.000.000
2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Capaian peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Terlaksananya Survey IKUB di Kab. Malinau	Dukungan 100 % terhadap kerukunan umat beragama di Kab. Malinau	Kab. Malinau	100 %	1 Kali	100 %	35.000.000

BAB V

PENUTUP

Bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri No. 050 – 3708 Tahun 2020, Kepmendagri Nomor 050 - 3389 Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan organisasi. Dengan harapan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2024 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hal-hal yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang bersinergis.

Malinau, Juli 2023

Kepala Badan

MULIYADI, SH., M.Si

Pembina TK I, IV/b

NIP. 19740525 200112 1 004

